

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/U/1998
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM
PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**AGUNG SAPUTRA
NPM. 141801045**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/22

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/U/1998
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM
PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**AGUNG SAPUTRA
NPM. 141801045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)24/8/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

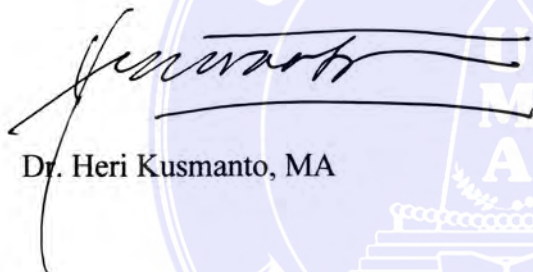
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul "Implementasi Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara".

N a m a : AGUNG SAPUTRA

N I M : 141801045

Pembimbing I



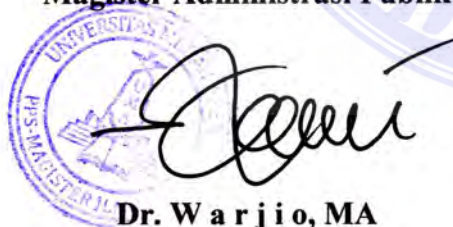
Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Dr. Kaiman Turnip, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warji, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

Telah diuji pada Tanggal 11 Oktober 2016

N a m a : Agung Saputra

N P M : 141801045



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Kaiman Turnip, M.Si
Penguji Tamu : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/U/1998 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

N a m a : Agung Saputra
N P M : 141801045
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Kaiman Turnip, M.Si

Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pembinaan yang dilakukan juga terkait dengan pembentukan struktur organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melaksanakan pembinaan kemahasiswaan bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Universitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan. Tidak hanya itu SOP yang diharapkan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai wadah aspirasi mahasiswa belum juga terealisasi dengan baik walaupun sudah disusun oleh biro kemahasiswaan dan alumni. Dengan demikian, perlunya penyempurnaan SOP tersebut sehingga pembinaan kemahasiswaan dapat berjalan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas. Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Organisasi dan Pembinaan Kemahasiswaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE DECISION THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF REPUBLIC OF INDONESIAN NO. 155/U/1998 ON THE FORMATION OF STUDENT ORGANIZATION MUHAMMADIYAH NORTH SUMATERA

Name : Agung Saputra
N P M : 141801045
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Kaiman Turnip, M.Si

Student guidance is highly required in college, because the program of character development is one of the stages or the way in producing quality graduates. The guidance that was also associated with the formation of the structure of student organizations at the University. North Sumatra Muhammadiyah University (UMSU) implementing student guidance aims to actualize the vision, mission and goals of the University. Generally, the development of guidance to the student organization can not run properly because there are no clear rules or guidelines to regulate the order of formation of student organizations. Furthermore, SOP (Standard Operational Prochedure) is expected to be a reference in implementing the guidance to the student organization as a forum for student aspirations have not been realized properly, despite being made by the Bureau of student affairs and alumni. Thus, the need for improvement of the SOP so that the student coaching can run optimally. The purpose of this study is to investigate the implementation of the Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 155 / U / 1998 on Student Organizations in the Development of Student Organizations in North Sumatra Muhammadiyah University, and to determine the factors that influence student development at the University of North Sumatra Muhammadiyah. This research uses descriptive method with qualitative approach. The results obtained in this study is that the implementation of the Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 155 / U / 1998 is not optimal on Student Organizations in UMSU because it is not accompanied by the implementation of the SOP relating to student guidance. This policy is also influenced by several factors that constrain that poor communication between student organizations and university leaders. Thus, it needs to encourage good cooperation between students and university leaders, faculty, and courses and accompanied by SOP to set about it.

Keywords: Policy, Organization and Development Affairs

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEPUTUSAN IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/U/1998 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya`kub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Heri Kusmanto, MA pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Dr. Kaiman Turnip, M.Si pembimbing II, yang juga turut banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
6. Bapak Rektor UMSU Dr. Agussani, M.AP beserta seluruh staf pegawai yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

8. Terimakasih kepada Orang Tua yang terus mendoakan keberhasilan penulis untuk menyelesaikan study.
9. Terimakasih pula kepada Istri Tercinta Nadia Fadila, S.Sos, Anakku Tercinta Lattifa Arka Putri Agung, Galih Syaidina Putra Agung, Ghatan Syabil Putra Agung, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
10. Sahabat – sahabat Magister Adminitrasi Publik Universitas Medan Area Angkatan 2014 Kelas B.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Oktober 2016

Penulis

AGUNG SAPUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	10
2.1. Kebijakan Publik	10
2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan.....	18
2.4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan	27
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Defenisi Konsep	31
3.3. Teknik Pengumpulan Data	31
3.4. Kategorisasi	32
3.5. Kerangka Konsep	33
3.6. Teknik Penentuan Nara Sumber / key informan	35
3.7. Teknik Analisis Data	36
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Penyajian Data	38
4.2. Analisis Data dan Pembahasan.....	47
4.2.1. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan	47
4.2.2. Faktor-faktor yang MempengaruhiPembinaan Kemahasiswaan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.....	62

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan berbagai bidang, dan secara khusus adalah bidang pendidikan. Upaya untuk mendukung tujuan tersebut, dilakukan beberapa pembinaan yang terkait dalam bidang pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, antara lain: lembaga formal dan lembaga informal.

Lembaga formal yang terkait dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah universitas. Lembaga ini merupakan wadah yang melakukan pembinaan pendidikan tingkat tinggi terhadap para mahasiswa. Pembinaan yang dilakukan di tingkat universitas sangat berbeda dengan pembinaan yang dilakukan di tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Pembinaan terhadap mahasiswa sangat penting dilakukan karena mahasiswa merupakan produk perubahan suatu generasi yang mengarah kepada kematangan pola berpikir kreatif dan keilmiahan. Mahasiswa juga merupakan generasi penerus bangsa yang dapat membawa kemajuan bangsa di tingkat nasional dan internasional. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pentingnya pembinaan mahasiswa yang dilakukan di perguruan tinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan

intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

Organisasi kemahasiswaan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang ada di setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi. Organisasi ini dibentuk untuk menjadi wadah dalam menampung aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan akademik dan pengembangan bakat mahasiswa yang bernilai positif.

Pembinaan yang dilakukan pihak Universitas akan berkaitan dengan pembinaan generasi muda karena mahasiswa adalah generasi muda yang diharapkan dapat menjadi calon pimpinan di kemudian hari. Dengan demikian, pembinaan tersebut juga dikoordinir pihak universitas dengan memberikan dukungan kepada mahasiswa yang tergabung dalam setiap lembaga kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan lembaga kemahasiswaan yang menampung semua aspirasi mahasiswa sehingga dapat menjembatani keinginan mahasiswa dalam memperoleh pembinaan akademik baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. BEM juga menjadi mitra universitas dalam melaksanakan pembinaan di setiap bidang yang dapat mendukung kemampuan mahasiswa baik bidang akademik ataupun non akademik (olah raga).

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi khususnya yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, pasal 5 ayat (1) Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis program dan kegiatan kemahasiswaan, ayat (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, ayat (3) Komunikasi antar mahasiswa, (4) Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan, (5) Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa, (6) Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, (7) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pembinaan kemahasiswaan di UMSU, belum dapat dikategorikan maksimal, karena pembenahan pengelolaan pembinaan yang dilakukan pihak universitas baru disusun sejak tahun 2014. Kendala terbesar selama ini adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang khusus mengatur tentang pembinaan kemahasiswaan. Di tahun 2015, SOP ini baru dirumuskan dan disusun untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi

Kemahasiswaan. Namun, kenyataannya belum dapat dilakukan penyempurnaan yang optimal.

Salah satu permasalahan yang penting dalam hambatan melakukan pembinaan baik secara akademik maupun non akademik adalah tingkat kedisiplinan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan dalam mensukseskan proses belajar di dalam kelas. Hal ini terkait dengan perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang tidak dapat melaksanakan proses belajar secara akademik dengan kedisiplinan. Secara non akademik, masih ada pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kampus, terkait dengan kebersihan, tertib acara dan kondusif kegiatan.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu universitas di Medan yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga kemahasiswaan. UMSU memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh BEM yang berkaitan dengan pembinaan mahasiswa.

UMSU mempunyai motto melahirkan sarjana yang unggul, cerdas dan terpercaya dan untuk melaksanakan motto tersebut, maka dilakukan upaya-upaya yang dapat mewujudkan motto tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan yang dikoordinir oleh Biro Kemahasiswaan di bawah naungan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi

Kemahasiswaan, bahwa dalam membentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan mempunyai tata cara yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di tingkat universitas. Pembinaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas. Pembentukan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UMSU di dasarkan kepada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merujuk kepada kebijakan menteri tersebut, yaitu Keputusan Rektor UMSU No. 1415/KEP/II.3-AU/UMSU/F2015 Tentang Komposisi dan Struktur Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Periode 2015 – 2016.

Terbentuknya majelis ini juga bertujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi serta tujuan UMSU. Pengembangan kehidupan mahasiswa adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional guna membentuk manusia Pancasila sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler. Dengan demikian, majelis ini juga merupakan bagian dari organisasi kemahasiswaan universitas yang bertugas mengawasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik tingkat universitas maupun fakultas.

Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan. Tidak hanya itu SOP yang diharapkan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai

wadah aspirasi mahasiswa belum juga terealisasi dengan baik walaupun sudah disusun oleh biro kemahasiswaan dan alumni.

Pembentukan organisasi kemahasiswaan dilakukan dengan sistem pemilihan umum (PEMILU) raya di lingkungan universitas, sehingga dapat mewujudkan proses demokrasi yang efektif. Namun, dalam proses demokrasi ini terdapat hambatan yang dapat merusak pembentukan organisasi kemahasiswaan dan proses yang berjalan dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengatur proses dan kinerja organisasi kemahasiswaan tersebut.

Tidak hanya perlunya penyusunan SOP, juga harus adanya komunikasi yang dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan pimpinan universitas maupun dekanat dan juga hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan dosen. Dengan demikian, diperlukan kerja ekstra dari biro kemahasiswaan sebagai kordinator dan penanggung jawab keorganisasian kemahasiswaan, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Sebagaimana yang dikatakan Musanef (1991:11) bahwa pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Terjalinnnya hubungan yang baik, maka akan tercipta iklim akademik yang kondusif dan nyaman. Kurang efektifnya komunikasi maka tidak efektif pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1999. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perilaku yang

menyimpang dari mahasiswa dengan melakukan atraksi-atraksi negatif yang tidak mendukung kebijakan universitas sehingga terjadi kesenjangan antara mahasiswa dan sistem birokrasi di kampus.

Organisasi kemahasiswaan yang terbentuk di UMSU, belum dapat dikatakan organisasi yang matang atau organisasi kemahasiswaan yang sudah memahami arti dari etika organisasi sehingga masih ada perilaku mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan yang tidak dapat dijadikan panutan atau contoh dengan mahasiswa yang lain. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan secara psikologis kepada setiap mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi kemahasiswaan tersebut. Namun, untuk melaksanakannya diperlukan tenaga-tenaga yang mempunyai bakat untuk melakukan pendekatan secara akademik kepada mahasiswa tersebut, sebagai upaya dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan di UMSU.

Tidak cukup dengan tenaga yang terampil, akan tetapi harus dibarengi dengan sarana dan prasarana (fasilitas) yang dapat mendukung setiap kegiatan positif yang direncanakan dan dirancang oleh organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, maka dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan yang kondusif dan dapat menjadi mitra universitas dalam melaksanakan pembinaan mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut yang terhimpun dalam organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan di UMSU sempat tidak aktif dikarenakan sistem keorganisasian mahasiswa dibekukan oleh pihak universitas disebabkan oleh terjadi kesalah pahaman antara mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi

mahasiswa dengan pihak rektorat dan sistem birokrasi. Ketidak aktifan organisasi mahasiswa tersebut, akhirnya kegiatan kemahasiswaan diambil alih oleh pihak universitas. Kegiatan tersebut adalah masa penyambutan mahasiswa baru (MPMB) yang diadakan setiap tahun ajaran baru. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa adanya mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi kemahasiswaan dan melibatkan para dosen yang ditunjuk oleh wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni melalui biro kemahasiswaan sebagai kordinator kegiatan.

Betapa pentingnya organisasi kemahasiswaan dalam setiap kegiatan universitas yang berkaitan dengan pengembangan akademik dan bakat mahasiswa. Dengan demikian, pembinaan organisasi kemahasiswaan sangat penting, guna membantu kinerja universitas dalam mengembangkan bakat dan kemajuan akademik mahasiswa sehingga mewujudkan visi dan misi universitas serta motto perguruan tinggi yaitu unggul, cerdas dan terpercaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai meliputi secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah bacaan dan penelitian di bidang administrasi publik melalui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan sebagai salah satu kajian pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada perguruan tinggi dalam melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan dan dapat menjadi acuan peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kebijakan Publik

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak disebut dengan kebijakan. Lubis (2007:05) menyatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Menurut Dunn (2003: 19) bahwa kebijakan adalah solusi atas suatu masalah, kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah.

Kebijakan secara umum yang dikemukakan oleh Abidin (2006:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana baik yang sifatnya positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksana adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
3. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
4. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksana.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan yang dikemukakan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman atau acuan yang

berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah dalam pencapaian tujuan.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Subarsono (2010:17) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Abidin (2006:23) mengemukakan bahwa kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Sedangkan Nugroho (2004: 15) mengatakan kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Pemecahan masalah dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003: 21) terdapat beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu:

1. Penetapan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*)

Dalam tahap ini memiliki 4 (empat) tahapan yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki, dan *brainstroming*, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahapan ini dapat digunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan yang diperoleh dari posisi yang tidak dapat ditentukan serta informasi yang terbatas. Tahapan ini juga menggunakan prosedur *forecasting* untuk memecahkan masalah yang terkandung konsekuensi pada setiap kebijakan yang dipilih.

3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tahapan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah yang terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat luas.
- b. Pengidentifikasi kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- c. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.

4. Isi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahapan ini merupakan tahapan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan yang ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur.

5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*)

Tahapan ini dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan melalui proses implementasi yang dinilai sesuai dengan yang telah ditentukan dan direncanakan dalam program kebijakan tersebut. Tangkilisan (2003:26) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seseorang analis atau evaluator kebijakan yaitu : (a) Aspek perumusan kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan. (b) Aspek implementasi kebijakan, dimana analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan. (c) Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Suatu kebijakan publik memiliki suatu mekanisme yang sistematis yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu masalah publik yang ada. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:40) adalah sebagai berikut: (1) Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar

dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan orang per orang. (2) Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara. (3) Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. (4) Namun didalam perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan di implementasikan dengan baik dan benar pula. (5) Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. (6) Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah yang mempunyai beberapa karakteristik kebijakan publik, yaitu:

1. Mempunyai tujuan tertentu.
2. Basis tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan.

4. Bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa. Kebijakan mempunyai tiga elemen, yaitu: identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai, strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan penyedia berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik merupakan proses dalam mengimplementasikan kebijakan karena penerapan kebijaksanaan yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik. Abdullah (1988), mengatakan terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam implementasi suatu kebijaksanaan yaitu: (1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan, (3) Unsur pelaksana (*implementors*), baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2014: 65), mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Wahab (2014: 66) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

Winarno (2014:141) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan Menurut Tangkilisan (2003:12), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standarperaturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tata cara dalam melaksanakan undang-undang maupun keputusan-keputusan yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang berbentuk suatu program untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai sehingga luaran kebijakan dapat terwujud.

Edwards III dalam Tangkilisan (2003:14) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan meski tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini dibutuhkan ke akuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal

ini, melainkan mereka juga mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Para implementator kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam organisasi yang dikehendaki relatif sedikit, dan adanya kesepakatan terhadap tujuan dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan termasuk relatif tinggi. Implementasi tidak cukup hanya dilihat dan diterima atau tidaknya suatu kebijakan, yang terpenting adalah kejelasan dari kebijakan itu sendiri.

2.3. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

Pembinaan berasal dari kata 'bina' yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Poerwadarminto (2007: 182), mengemukakan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk

meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan objek dengan tindakan pengarahan serta pengawasan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kata pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan, menurut Wahjosumidjo (2002: 241) mempunyai arti khusus, yaitu usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, pemantapan, peningkatan, arahan terhadap pola pikir, sikap mental, perilaku, minat, bakat dan ketrampilan para mahasiswa melalui program kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program setiap lembaga yang ada di kampus.

Tohirin (2007: 16) mengemukakan bahwa pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan memberi bimbingan. Bimbingan merupakan arti dari kata '*guidance*' berasal dari kata dasar '*guide*' yang mempunyai beberapa arti, yaitu: (1) menunjukkan jalan (*showing the way*), (2) memimpin (*leading*), (3) memberikan petunjuk (*giving instruction*), (4) mengatur (*regulating*), (5) mengarahkan (*governing*), dan (6) memberi nasehat (*giving advice*). Istilah '*guidance*' juga diterjemahkan dengan arti bantuan, tuntunan serta pertolongan. Kemudian Musanef (1991:11) mengatakan pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.

Menurut Thoha (2012: 117) pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Jadi pembinaan merupakan faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan

keahlian, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Jika tugas yang dilaksanakan agar memperoleh hasil yang baik, maka pimpinan dapat mengadakan di dalam organisasi yaitu pembinaan pegawai. Pembinaan biasanya dilaksanakan oleh pimpinan organisasi, dimana pimpinan berperan aktif di dalam organisasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah proses yang dilakukan yang berupa tindakan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan menuju perubahan dan kemajuan yang berguna untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pembinaan ini juga harus didukung sarana dan prasarana serta berbagai metode dan tata cara dalam melaksanakan pembinaan sehingga tujuan yang dicapai dapat menghasilkan manfaat di setiap bidang khususnya di bidang kemahasiswaan.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Menurut Robert H. Hayes dalam Sirait (1991: 145) mengidentifikasi 5 (lima) ciri utama dari strategi pembinaan (*directing strategy*), yaitu:

1. Wawasan waktu (*time horizon*).

Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.

2. Dampak (*impact*).

Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.

3. Pemusatan Upaya (*concentration of effort*).

Sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.

4. Pola Keputusan (*pattern decision*).

Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.

5. Peresapan.

Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi kemahasiswaan tak terlepas dari strategi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dalam proses pembinaan organisasi kemahasiswaan. Sirait (1991:143), menyatakan bahwa strategi pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana. Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya

yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut.

Organisasi selalu dikaitkan dengan suatu sistem administrasi dan aktivitas yang terkoordinasikan secara sadar yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Syafii dan Welasari (2015: 72-73), mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, atau: (1) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, (2) Di dalamnya terjadi berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi, (3) Terjadi proses dan pembagian tugas, (4) Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Robbins (1990: 10-11) menyatakan bahwa organisasi adalah (1) Suatu kumpulan orang yang ingin mencapai tujuan secara rasional, (2) Suatu Koalisi dari konstituen yang berkuasa dimana mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol distribusi sumberdaya dalam organisasi, (3) Suatu sistem terbuka dimana terjadi sistem transformasi input-output dengan lingkungan, (4) Sistem yang menghasilkan pemaknaan tertentu, dimana tujuan diciptakan secara simbolik dan dipelihara oleh manajemen, (5) Sistem pasangan yang independen, dimana unit-unit yang berada di dalamnya dapat memiliki tujuan yang berbeda atau konflik, (6) Suatu sistem politik, dimana konstituen internal berusaha mengontrol proses pembuatan keputusan dalam memantapkan posisinya, (7) Suatu alat untuk mendominasi, (8) Suatu unit yang memproses informasi baik secara horisontal maupun secara vertikal melalui suatu hirarki struktural, (9) Suatu penjara psikis,

dimana para anggotanya selalu diteken/dihambat kebebasannya oleh organisasi misalnya dengan menetapkan pembagian kerja, standart kerja, pembentukan unit dan divisi, (10) Suatu kontrak sosial dimana terdapat serangkaian kesepakatan yang tidak tertulis dan para anggotanya harus berperilaku sedemikian rupa sehingga mendapatkan kompensasi.

Shafritz dan Russel (1997: 201), mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Keban (2014: 127), bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standart kerja, tanggung jawab dan obrolan tertentu.

Pengelompokkan dalam organisasi mempunyai sasaran yaitu gejala-gejala keorganisasian yang terdapat dalam masyarakat. Anggara (2012: 53), mengemukakan bahwa gejala keorganisasian sebagai berikut:

1. Kelahiran

Kelahiran di sini ialah saat terbentuknya organisasi secara administratif atau formal. Adakalanya saat kelahiran suatu organisasi sukar ditelusuri, namun konsep kelahiran itu tetap penting.

2. Berkembang

Fase perkembangan organisasi ialah periode sejak kelahiran sampai pada tahap dewasa, "*take off*" atau "*break even*".

3. Beranak

Beranak artinya bercabang, membuka perwakilan, membentuk anak perusahaan dan sebagainya.

4. Bergabung

Artinya berfusi, membentuk grup dan sebagainya.

5. Berhasil

Berarti melaksanakan tugas dengan baik, atau berhasil mencapai tujuan organisasional.

6. Pecah

Sukses dapat menimbulkan perpecahan

7. Merosot

Kendatipun tidak pecah, organisasi dapat mengalami kemerosotan.

8. Perubahan

Jalan keluar dari kemerosotan ialah perubahan, reformasi, atau pembangunan organisasi.

9. Kematian

Jika organisasi tidak mampu bangkit, ia mati.

10. Bubar

Jika organisasi telah melakukan tugasnya, ia dapat dibubarkan.

Istilah organisasi tidak hanya berkaitan dengan pengorganisasian secara terperinci, studi tentang struktur, fungsi, penampilan organisasi, perilaku individu tetapi juga harus berkaitan dengan pemeliharaan, peningkatan efektivitas, perubahan, hubungan dengan lingkungan, konflik penyakit, analisis, perbaikan

dan pembangunan organisasi berikut perilaku manusia di dalam organisasi tersebut.

Dengan demikian, dalam sebuah organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan sangat dibutuhkan sebuah struktur karena di dalamnya terdapat sikap dan perilaku struktural yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari dari setiap anggota dalam organisasi tersebut. Sikap dan perilaku tersebut dapat menjadi unsur utama perubahan dalam pengembangan organisasi karena berkaitan dengan perbaikan kinerja dari organisasi tersebut.

Perubahan dan perkembangan organisasi kemahasiswaan dimulai dari *human input* sampai dengan *human output* karena berkaitan dengan karakter, kepribadian, sikap dan bakat seseorang sehingga dapat dilaksanakan segala keputusan-keputusan yang dapat mendukung kinerja organisasi tersebut. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa setiap individu dalam organisasi kemahasiswaan harus tunduk dan patuh terhadap sistem yang berlaku dalam organisasi teratas yaitu universitas/ perguruan tinggi yaitu mengacu pada visi dan misi universitas.

Organisasi kemahasiswaan merupakan sekelompok mahasiswa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung akademik di tingkat universitas maupun fakultas yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi universitas dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Syafii dan Welasari (2015: 83), mengemukakan bahwa organisasi mahasiswa merupakan salah satu organisasi yang bersifat terbuka dalam melaksanakan kegiatan pendukung akademik yang

berpengaruh kepada lingkungan mahasiswa untuk perubahan dan pengembangan universitas.

Mahasiswa (peserta didik) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Khusus pada perguruan tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan pembimbingan kemahasiswaan yaitu pembimbingan seluruh kegiatan mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan.

Mahasiswa sebagai generasi penerus juga merupakan asset bangsa, karena mahasiswa; (1) Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa. (2) Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik. (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, kognisi, personel dan sosial.

Penyelenggara pembinaan organisasi kemahasiswaan mempunyai kewajiban:

1. Organisasi berorientasi pada tata kelola para mahasiswa (Badan Eksekutif Mahasiswa/atau sejenisnya) di dalam Perguruan Tinggi.
2. Organisasi pengembangan kemahasiswaan bakat, minat, kegemaran dan kesejahteraan yaitu unit kegiatan mahasiswa (UKM).

Kegiatan kemahasiswaan terkait dalam kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.

2.4. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

Keputusan-keputusan yang diambil oleh setiap organisasi baik formal maupun non formal merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Keputusan-keputusan tersebut pada akhirnya akan menjadi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan, misalnya dalam pembentukan organisasi kemahasiswaan.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 dibuat untuk mengatur tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan untuk mendukung pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan pihak universitas melalui tangan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas dan program studi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pembinaan organisasi kemahasiswaan yang dilakukan di perguruan tinggi juga bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, pasal 1 ayat

(4) dan (5) menyatakan bahwa kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya) sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bukti sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembinaan kemahasiswaan dilakukan hanya terkait dengan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, untuk mendukung pembinaan tersebut dibutuhkan implemetasi kebijakan dalam pencapaian tujuan, yang dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.

Melalui implementasi 4 (empat) faktor tersebut diharapkan dapat menciptakan mahasiswa yang unggul, cerdas dan terpercaya. Implementasi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, ini juga dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi khususnya visi misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Mahasiswa yang terlibat langsung dalam organisasi kemahasiswaan, akan mendapatkan banyak manfaat. Pertiwi, DKK (2015: 230-231), mengemukakan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan suatu wadah untuk mengembangkan/membentuk *soft skill* kita yang mungkin belum terasah. Mahasiswa yang mengikuti organisasi kemahasiswaan akan memperoleh banyak manfaat dan dapat menjadi pengalaman tersendiri dalam menjalani studi serta

bekal dalam mencari sebuah pekerjaan. Manfaat dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan, sebagai berikut:

1. Melatih Leadership
2. Belajar Mengatur Waktu
3. Memperkuat Jaringan atau Networking
4. Mengasah Kemampuan Sosial
5. *Problem Solving* dan Manajemen Konflik

Untuk mendukung penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan dibutuhkan beberapa unsur:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat universitas, Pembina utama adalah Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor khususnya Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Di tingkat fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan khususnya bidang kemahasiswaan.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan lain yang disediakan oleh universitas selain lembaga mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu dibantu universitas, selain itu juga ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2010:52), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

3.2. Defenisi Konsep

Dari uraian diatas maka digunakan suatu konsep pemikiran untuk mempersempit suatu penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu aksi pemerintahan dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.
3. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan wadah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan ide untuk mengembangkan potensi diri sebagai seorang mahasiswa yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi universitas.
4. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan adalah proses memberikan pengarahan dan pembimbingan yang dilakukan kepada mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang bertujuan agar proses yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian, melalui cara:

a. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala dalam penelitian khususnya tentang pembinaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Wawancara

Yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung khususnya tentang Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

(Pasolong, 2012: 131-132)

2. Data Sekunder

Penelitian yang mempelajari dan mengumpulkan data-data dan literature sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian.

3.4. Kategorisasi

Adapun kategorisasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi ini dibutuhkan untuk mentransmisikan keputusan yang dihasilkan dan diterima secara akurat oleh implementator.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan staf dalam mengimplementasikan kebijakan dan didukung oleh sarana dan prasarana (fasilitas) dalam memberikan pembinaan organisasi kemahasiswaan.

3. Disposisi

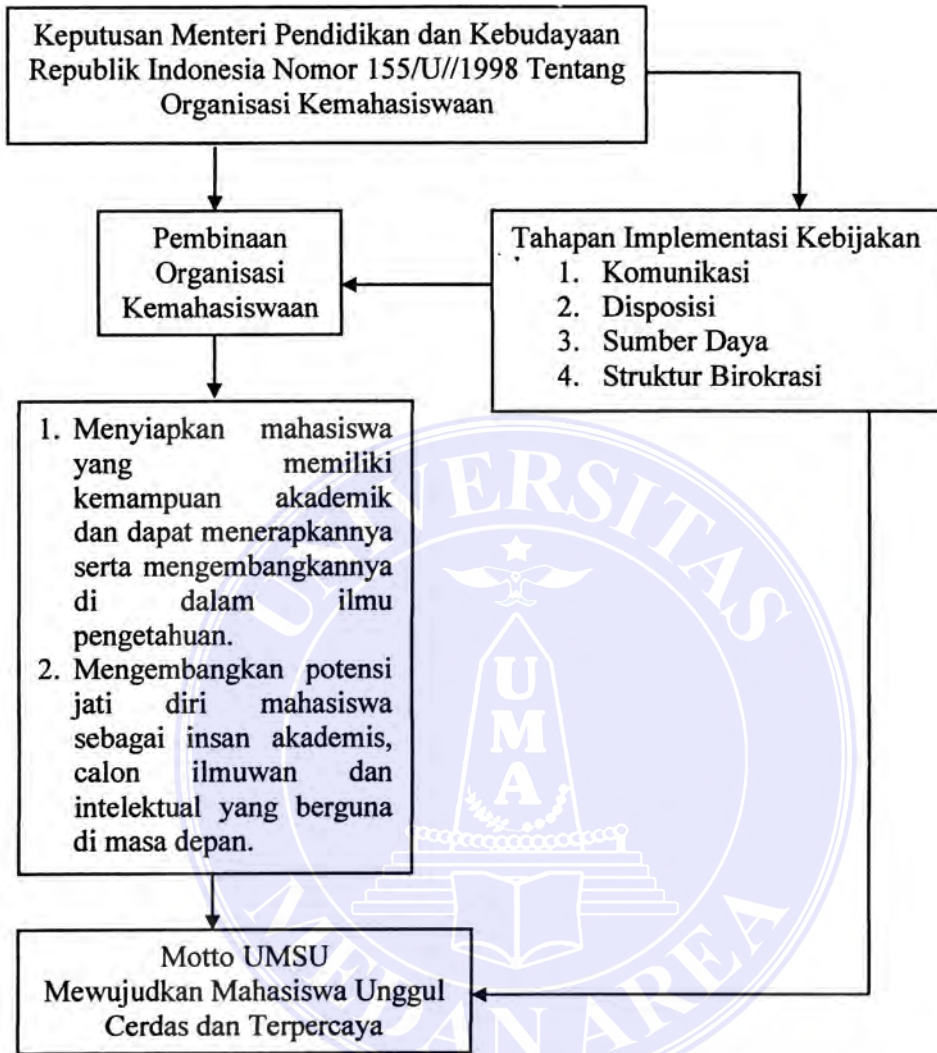
Sikap dan kepatuhan dari implementator dalam melaksanakan kebijakan yang diterima dan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

4. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan prosedur pengoperasian standar dan fragmentasi atau dengan kata lain standar operasional prosedur (SOP) tentang pembinaan organisasi kemahasiswaan.

E. Kerangka Konsep

Bagan kerangka konsep Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dilaksanakan dan direalisasikan untuk pembinaan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkannya serta mengembangkannya di

dalam ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan sehingga terwujudnya mahasiswa yang unggul, cerdas dan terpercaya sesuai dengan MOTTO UMSU. Menerapkan kebijakan tersebut disesuaikan dengan tahapan implementasi kebijakan yang terkait dengan 4 unsur yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.

F. Teknik Penentuan Nara Sumber / Key Informan

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu orang-orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informasi yang terkait dengan masalah penelitian ini. Oleh karenanya informan ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan. Hajar (2013: 25), mengemukakan bahwa kriteria memilih informan sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki posisi penting di organisasi yang bersangkutan.
- b. Mengetahui dengan baik mengenai penelitian.

Jumlah informan yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yang terdiri dari:

- a. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- b. Biro Kemahasiswaan sebanyak 1 orang
- c. Organisasi Kemahasiswaan, yaitu dari BEM-Universitas sebanyak 2 orang.
- d. Dosen Pembimbing Akademik sebanyak 3 orang

- e. Mahasiswa yang mengikuti pembinaan kemahasiswaan yaitu sebanyak 4 orang.

Melalui informan diharapkan akan dapat menyingkap lebih dalam dan luas tentang Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3.7. Teknik Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan di analisis terlebih dahulu, sehingga dapat di jadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Menurut Maleong (2006:121) bahwa analisis kualitatif adalah proses pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasra sehingga dapat di kemukakan tema serta sesuai dengan yang di sarankan oleh data. Proses analisis kualitatif ini di lakukan dalam tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data di sajikan secara tertulis.

3. Menarik kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah dalam penyaluran bakat dan minat mahasiswa yang mempunyai potensi, dan mempunyai kemampuan dalam berkreasi dan beraktivitas baik secara akademik dan non akademik. Pembinaan yang dilakukan dalam organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai inovatif dan kreatif serta mempunyai dedikasi dan loyalitas kelembagaan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Organisasi kemahasiswaan diberikan pembinaan terkait untuk mengembangkan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta memberikan kontribusi sehingga mampu berdaya saing yang dibekali dengan kekuatan moral yang berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

UMSU sebagai perguruan tinggi yang mempunyai kesiapan dalam menyiapkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi secara professional baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya yang dilakukan UMSU untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang memosisikan mahasiswa sebagai aset bangsa. Komponen yang sangat berpengaruh dalam kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan adalah penentu kebijakan (Pimpinan Universitas dan Fakultas/Senat Universitas), Dosen

Penasehat Akademik sebagai pendamping mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, mahasiswa.

Pembinaan kemahasiswaan di UMSU belum terlaksana dengan optimal disebabkan oleh belum sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dijalankan. Tidak maksimalnya SOP bidang kemahasiswaan sehingga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di UMSU belum terealisasi dengan baik. Hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan tersebut adalah rendahnya tingkat pelaksanaan SOP khususnya bidang kemahasiswaan.

5.2. Saran

Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kemampuan komunikasi dan emosi mahasiswa dalam berorganisasi perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan jaringan di luar kampus baik di bidang akademik maupun non akademik.
2. Perlunya seleksi dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan sehingga mahasiswa yang menjadi pengurus inti dalam organisasi kemahasiswaan khususnya BEM (Universitas dan Fakultas) adalah mahasiswa yang benar-benar mempunyai kemampuan dan potensi yang dapat memberikan contoh bagi mahasiswa yang lain.
3. Perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam penanganan kode etik lembaga kemahasiswaan dan kedisiplinan mahasiswa yang dirumuskan oleh pihak

perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) khususnya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembinaan kemahasiswaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Syukur. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi*, makalah yang Disajikan Pada Temu Kaji Nasional PERSADI Pusat, Ujung Pandang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makasar
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hajar, Siti. 2013. *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Hampan Perak*, Penelitian Dosen Muda Internal: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Keban, T. Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang *Organisasi Kemahasiswaan*.
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1415/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2015 Tentang *Komposisi dan Struktur Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014

- Pertiwi, Mustika Cahyaning, DKK. 2015. *Hubungan Organisasi Dengan Mahasiswa Dalam Menciptakan Leadership*, diseminarkan dalam Lokakarya Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Menuju Peserta Didik yang Berkarakter dalam Proseding ISBN 978-602-7047-1-2; Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Robbins, S.P. 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications (Third Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Shafritz, J.M., and E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Addison-Wesley Educational Publisher Inc.
- Sirait, Alfonsus. 1990. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, A. G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Syafii, Inu Kencana dan Welasari. 2015. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2012. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnostis dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wahab, Sholihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah menurut Bapak tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1999?
2. Bagaimanakah menurut Bapak, kemampuan organisasi kemahasiswaan (BEM) di UMSU dalam melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1999?
3. Apakah menurut Bapak, pembentukan BEM sebagai organisasi kemahasiswaan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1999?
4. Bagaimanakah menurut Bapak, upaya yang dilakukan UMSU untuk mendukung pembinaan organisasi kemahasiswaan?
5. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan organisasi kemahasiswaan yang dilakukan oleh UMSU dikordinir oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni?
6. Apakah dalam melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan di UMSU sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang disusun oleh pihak Universitas?
7. Bagaimanakah kemampuan BEM sebagai organisasi kemahasiswaan dalam bekerjasama dengan pihak Universitas untuk melakukan pembinaan kemahasiswaan?

